

**ANALISIS DINAMIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI GOLKAR
: STUDI KASUS PERAN DAN STRATEGI ORGANISASI SAYAP KPPG**

Rahma Syakira Ayu, Ananda Dewi, Nayla Febrina Putri, Aniqotul Ummah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email Korespondensi: 2310413006@mahasiswa.upnvj.ac.id

Email: 2310413009@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2310413013@mahasiswa.upnvj.ac.id;

aniqotul.ummah@upnvj.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of women's representation in the Golkar Party, focusing on the role and strategy of the Golkar Party Women's Unity (KPPG) wing organization. Although there has been an affirmative policy in the form of a 30% quota for women in legislative nominations, its implementation in the party's internal structure has not been fully optimal. This study uses a qualitative descriptive approach based on literature studies with Hanna Pitkin's theory of political representation and Anne Phillips' theory of political presence. The results of this study indicate that KPPG plays an important role in cadre formation, political education, internal advocacy, and the formation of strategic networks to strengthen women's positions in the Golkar Party. KPPG's strategies such as leadership training, mentoring, and gender quota advocacy have resulted in an increase in the number of female legislators from this party. However, significant challenges are still faced, including patriarchal culture, male elite dominance, limited access to political and financial resources, and resistance to internal change. This study emphasizes that women's representation is not only about quantity, but also quality and strategic position in political decision-making. Therefore, KPPG needs to continue to strengthen its institutional base and expand its advocacy strategy in order to realize substantive women's representation in the Golkar Party.

Keywords: Golkar, Representation, KPPG, Women

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika keterwakilan perempuan dalam Partai Golkar, dengan fokus pada peran dan strategi organisasi sayap Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Meski telah ada kebijakan afirmatif berupa kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan legislatif, implementasinya dalam struktur internal partai belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dengan teori representasi politik Hanna Pitkin dan teori politik kehadiran Anne Phillips. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPG memainkan peran penting dalam kaderisasi, pendidikan politik, advokasi internal, dan pembentukan jaringan strategis untuk memperkuat posisi perempuan dalam Partai Golkar. Strategi-strategi KPPG seperti pelatihan kepemimpinan, mentoring, serta advokasi kuota gender telah menghasilkan peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan dari partai ini. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi, antara lain budaya patriarki, dominasi elite laki-laki, keterbatasan akses sumber daya politik dan finansial, serta resistensi terhadap perubahan internal. Studi ini menekankan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas dan posisi strategis dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, KPPG perlu terus memperkuat basis kelembagaan dan memperluas strategi advokasinya agar dapat mewujudkan representasi perempuan yang substantif dalam tubuh Partai Golkar.

Kata kunci: Golkar, Keterwakilan, KPPG, Perempuan

PENDAHULUAN

Partai Golkar sebagai salah satu partai politik tertua dan terbesar di Indonesia memiliki peran signifikan dalam dinamika politik nasional, dan partai Golkar telah berkontribusi signifikan dalam peta politik negara dari masa Orde Baru sampai era Reformasi saat ini. Sejak didirikan pada tahun 1964, partai ini telah menjadi aktor utama dalam berbagai proses pengambilan kebijakan dan pemilihan umum. Menurut Randi, Partai Golkar juga dikenal sebagai partai yang memiliki struktur organisasi yang solid dan disiplin tinggi, yang memungkinkannya untuk tetap menjadi kekuatan utama dalam setiap pemilihan umum, (Randi, 2024). Karakteristik inilah yang memungkinkan Partai Golkar untuk tetap eksis dan terus bersaing dalam setiap pertarungan politik di Indonesia, baik pada level nasional maupun daerah. Partai Golkar juga terkenal dengan sistem organisasi yang solid, jaringan anggotanya yang luas, serta tingkat kedisiplinan internal yang tinggi.

Namun, meskipun memiliki sejarah panjang dan pengaruh yang besar, Partai Golkar masih menghadapi tantangan dalam hal keterwakilan perempuan, terutama dalam dunia politik saat ini yang menekankan nilai inklusi dan kesetaraan antara gender, kehadiran perempuan dalam struktur dan proses pengambilan keputusan partai adalah isu krusial yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menetapkan kuota minimum 30% untuk representasi perempuan dalam pencalonan legislatif, (Fathoni et al., 2024). Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Menurut Safithri, meskipun partai ini telah mengadopsi kebijakan afirmatif, seperti kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen, namun implementasinya di tingkat internal partai masih belum optimal, (Safithri, 2024).

Perempuan masih seringkali ditempatkan dalam posisi yang kurang strategis atau hanya sebagai "pelengkap" dalam struktur kepemimpinan partai. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dan kultural yang masih belum sepenuhnya diperbaiki di dalam partai. Budaya politik yang didominasi oleh laki-laki, penolakan internal terhadap perubahan, dan terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya politik dan ekonomi menjadi penghalang utama dalam mewujudkan representasi politik yang adil. Keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya mengenai seberapa banyak, tetapi juga mengenai mutu dan posisi strategis yang dapat mempengaruhi kebijakan partai serta negara. Dalam konteks ini, organisasi sayap Partai Golkar, yaitu Korps Pergerakan Perempuan Golkar (KPPG), memiliki peran strategis untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di tubuh partai. Menurut Lutfiyah, KPPG tidak hanya berfungsi sebagai wadah pemberdayaan perempuan, tetapi juga sebagai saluran untuk mengadvokasi kebijakan yang pro-kesetaraan gender, (Lutfiyah, n.d.).

Namun, efektivitas KPPG dalam meningkatkan representasi perempuan yang signifikan masih belum bebas dari berbagai kendala. Keterbatasan dalam dana dan sumber daya, minimnya dukungan dari elit partai, serta penolakan ideologis yang datang dari kelompok konservatif di dalam Partai Golkar merupakan halangan utama. Di sisi lain, KPPG juga dituntut untuk mengubah strategi agar dapat menarik perhatian generasi muda perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik serta memperkuat posisi perempuan dalam struktur kekuasaan partai.

Keterwakilan perempuan dalam politik masih menjadi tantangan di Indonesia, meskipun telah ada kebijakan afirmasi seperti kuota 30% bagi perempuan di legislatif. Partai Golkar, melalui organisasi sayapnya, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), berperan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, terutama dalam proses rekrutmen dan pemilihan legislatif. Namun, berbagai hambatan seperti kendala struktural dan budaya masih menjadi tantangan dalam pencapaian keterwakilan perempuan yang optimal. Untuk memahami lebih dalam peran dan strategi KPPG dalam mendorong keterwakilan perempuan di Partai Golkar, penelitian ini akan mengulas beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Jihan Lutfiyah (2023) berjudul Perempuan dan Politik: Upaya Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dalam

Peningkatan Keterpilihan Perempuan Partai Golkar di DPR RI pada Pemilu Legislatif 2019. Penelitian ini mengkaji strategi KPPG dalam meningkatkan keterpilihan caleg perempuan Partai Golkar pada Pemilu 2019. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan tokoh-tokoh Golkar, penelitian menemukan bahwa strategi internal seperti sekolah politik, rekrutmen, dan kampanye, serta aliansi eksternal, berhasil meningkatkan keterpilihan perempuan dari 18% (2014) menjadi 22% (2019). Namun, studi ini belum mendalam dalam menjelaskan pengaruh strategi terhadap partisipasi pemilih perempuan dan dinamika internal partai, (Lutfiyah, n.d.).

Lalu, Penelitian oleh Lira Ayunda dan Ananda Mahardika (2022) yang berjudul dalam jurnal Strategi Manajemen Organisasi dalam Upaya Meningkatkan Keaktifan Kader Perempuan di DPD Golkar Tebing Tinggi, membahas strategi manajemen organisasi DPD Partai Golkar Tebing Tinggi dalam meningkatkan keaktifan kader perempuan melalui penguatan organisasi dan kaderisasi politik berbasis gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa penguatan kaderisasi di tingkat lokal cukup efektif dalam mendorong keterlibatan perempuan, meskipun hasilnya belum dapat *digeneralisasi* secara nasional, (Ayunda & Mahardika, 2022). Selanjutnya penelitian, Wan Asrida, Wazni, dan Chitra Puspita Dewi (2009) yang berjudul “Gerakan Politik Perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru Periode 2004–2009 dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan”. Penelitian ini meneliti gerakan politik perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru periode 2004–2009. Dengan pendekatan kualitatif historis, penelitian ini menemukan bahwa perempuan di Golkar memanfaatkan struktur partai dan legislatif untuk memperjuangkan agenda gender, namun terbatas oleh sistem politik yang masih didominasi laki-laki serta tantangan dalam penerapan kuota gender, (Asrida et al., 2009).

Lalu penelitian oleh Isnaini Anis Farhah (2017) yang berjudul Keterwakilan Perempuan dalam Partai Golkar di Kabupaten Lebak juga memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan keterwakilan perempuan di tingkat lokal, penelitian ini mengkaji keterwakilan perempuan dalam Partai Golkar di Kabupaten Lebak. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat kebijakan kuota 30%, keterwakilan perempuan masih terhambat oleh rendahnya komitmen partai, serta adanya hambatan struktural dan kultural, (Farhah, 2018). Sementara itu, penelitian oleh Sindi Oktavira dan Lince Magriasti (2023) yang berjudul *The Role of Golkar Party Women Units (KPPG) in the Political Recruitment of Women Legislative Candidates*. Berfokus pada peran KPPG dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Golkar. Dengan metode kualitatif, mereka menemukan mereka menemukan bahwa KPPG cenderung menerapkan sistem rekrutmen semi-terbuka dengan prioritas kepada kader internal dan individu yang memiliki hubungan dengan elite partai, namun belum tampak jelas dampaknya terhadap peningkatan jumlah perempuan di legislatif, (Oktavira & Magriasti, 2023a).

Dari lima penelitian tersebut, terlihat bahwa keterwakilan perempuan di Partai Golkar masih menghadapi tantangan struktural dan manajerial. Jihan Lutfiyah (2023) menyoroti strategi KPPG dalam meningkatkan keterpilihan perempuan, sementara Lira Ayunda dan Isnaini Anis Farhah membahas hambatan internal partai. Perspektif historis dari Wan Asrida et al. (2009) memperkaya pemahaman atas perjuangan politik perempuan Golkar. Sindi Oktavira dan Lince Magriasti (2023) menambahkan analisis rekrutmen KPPG, meski belum menyentuh aspek strategi elektoral secara menyeluruh. Maka, penelitian ini dibuat untuk melengkapi celah penelitian sebelumnya dengan fokus pada dinamika internal KPPG dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan di Partai Golkar, khususnya dalam konteks strategi politik yang diterapkan untuk memperkuat peran perempuan dalam partai dan legislatif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika keterwakilan perempuan dalam Partai Golkar dengan fokus pada peran dan strategi yang dijalankan oleh KPPG. Namun, efektivitas KPPG masih dihadapkan pada tantangan, seperti kurangnya dukungan finansial, resistensi dari kelompok konservatif dalam partai, dan keterbatasan akses perempuan ke posisi strategis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai representasi yang lebih inklusif di tubuh Partai Golkar, dan untuk menganalisis dinamika keterwakilan perempuan dalam Partai

Golkar dengan fokus pada peran dan strategi KPPG, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung upaya peningkatan keterwakilan perempuan di partai tersebut. Maka dari itu, pertanyaan penelitian ini adalah "Bagaimana peran dan strategi KPPG dalam memperjuangkan serta meningkatkan keterwakilan dan partisipasi politik perempuan di struktur kepemimpinan Partai Golkar?".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Annur & Hermansyah, Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan secara menyeluruh fenomena yang dikaji, (Annur & Hermansyah, 2020). Pengumpulan data pada penelitian ini dengan data sekunder yaitu studi literatur, yang dimana data diperoleh dari buku, jurnal, artikel yang relevan dengan topik Peran dan Strategi Organisasi Sayap KPPG pada Partai Golkar. Menurut Habsy, Studi literatur merupakan metode mengumpulkan data dari berbagai literatur tentang subjek penelitian, (Habsy, 2017). Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan topik jurnal ini, yaitu Teori Representasi Politik dari Hanna Pitkin (1967) dan Teori Mobilisasi Politik dari Sidney Tarrow (1998), untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Teori Representasi Politik

Teori Representasi politik karya Hanna Pitkin yang dijelaskan dalam buku *The Concept of Representation* (1967), Dalam teori ini dalam jurnal Fitriana, Pitkin mendefinisikan dua komponen utama representasi politik: yaitu kewenangan (atau otoritas) dan tanggung jawab. Dalam hal ini, kewenangan berarti pelimpahan hak atau tanggung jawab oleh satu pihak, baik individu maupun kelompok, kepada pihak lain yang bertindak sebagai perwakilan mereka dalam ranah politik. Pelimpahan ini bukan hanya formalitas, tetapi juga legitimasi yang memberi perwakilan kemampuan untuk membuat keputusan atas nama pihak yang diwakilinya, (Fitriana, 2019). Namun, tanggung jawab dalam representasi politik menekankan bahwa perwakilan harus memperjuangkan kepentingan dan keinginan pihak yang mereka wakili. Menurut Fitriana, Tanggung jawab ini mencerminkan prinsip akuntabilitas, yang berarti bahwa perwakilan tidak hanya memiliki hak untuk bertindak, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang mereka buat. Oleh karena itu, representasi tidak hanya tentang keberadaan perwakilan dalam struktur politik, tetapi juga tentang bagaimana perwakilan menjalankan peran dan fungsi mereka dengan efektif dan sesuai dengan kepentingan konstituen mereka, (Fitriana, 2019).

Pitkin juga menjelaskan bahwa representasi melibatkan tidak hanya kehadiran langsung seseorang dalam lembaga politik, tetapi juga proses melalui mana kepentingan yang diwakili benar-benar diperjuangkan dalam pengambilan keputusan politik. Pitkin membagi empat jenis representasi politik utama dalam teorinya yaitu : representasi formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif, (Fenichel Pitkin, 1967). Representasi substantif menekankan bagaimana seorang perwakilan bertindak sesuai dengan kepentingan kelompok yang diwakilinya, tanpa harus memiliki karakteristik yang sama. Di sisi lain, representasi deskriptif merujuk pada keterwakilan berdasarkan atribut tertentu seperti gender, ras, atau etnis, (Fenichel Pitkin, 1967). Dalam penelitian tentang keterwakilan perempuan di Partai Golkar dalam organisasi sayap KPPG, teori ini relevan untuk melihat bagaimana kehadiran perempuan dalam partai mencerminkan kepentingan politik perempuan dan bagaimana strategi organisasi sayap perempuan seperti KPPG membantu mendukung kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Teori Gender dan Politik

Dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Presence* (1995), Anne Phillips menyatakan bahwa kehadiran fisik sangat penting bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam institusi politik, termasuk perempuan, (Phillips, 1995). Dalam jurnal Suryani & Azme, Phillips berpendapat bahwa representasi deskriptif, yaitu kehadiran langsung perempuan dalam struktur politik, sangat penting untuk

menjamin bahwa kepentingan perempuan benar-benar diperjuangkan selama proses pengambilan kebijakan, (Suryani & Azmy, 2020). Dalam Jurnal Lestari, Phillips menekankan dalam teorinya bahwa karena struktur sosial dan politik yang sering bias gender, laki-laki telah mengambil alih politik, (Lestari, 2019). Dalam sistem seperti ini, perempuan seringkali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk membuat keputusan politik di lembaga legislatif dan partai politik. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa tidak hanya mekanisme demokrasi yang ada yang harus digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, tetapi juga kebijakan afirmatif seperti kuota gender harus digunakan, (Lestari, 2019).

Phillips juga menekankan bahwa representasi perempuan dalam politik bukan hanya masalah jumlah, tetapi juga legitimasi sistem politik dan kepercayaan publik, (Tias et al., 2023). Karena perempuan masih menjadi minoritas dalam lembaga politik, kebijakan yang dibuat seringkali tidak mewakili pengalaman dan kebutuhan perempuan secara keseluruhan. Dengan kata lain, para pembuat kebijakan yang mayoritas laki-laki berisiko mengabaikan atau memahami kepentingan perempuan jika tidak ada keterwakilan perempuan yang memadai. Oleh karena itu, Phillips menawarkan ide politik kehadiran, di mana perempuan harus hadir dalam politik untuk memastikan perspektif gender ada dalam kebijakan. Phillips menawarkan ide politik kehadiran, di mana perempuan harus hadir dalam politik untuk memastikan perspektif gender ada dalam kebijakan, (Muzaeni, n.d.). Konsep *The Politics of Presence* juga membahas bagaimana partai politik dan lembaga politik harus berubah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan. Phillips berpendapat bahwa kebijakan representasi perempuan tidak boleh dianggap sebagai ancaman terhadap sistem meritokrasi, tetapi sebagai bentuk demokrasi yang lebih inklusif. Ia menolak gagasan bahwa keterwakilan perempuan dalam konteks ini bukan hanya simbol, tetapi merupakan langkah penting menuju sistem politik yang lebih adil dan mempertimbangkan keberagaman masyarakat. Dengan konsep *The Politics of Presence* untuk melihat seberapa baik KPPG melakukan tugasnya untuk meningkatkan representasi perempuan di Partai Golkar dan apakah Partai Golkar telah memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk berkontribusi dalam politik nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membantu memahami dinamika internal Partai Golkar dalam konteks gender, tetapi juga memberikan wawasan.

Peran KPPG dalam Memperjuangkan Keterwakilan Perempuan di Golkar

Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) memiliki peran penting dan strategis dalam mendorong keterwakilan perempuan baik di lingkungan internal Partai Golkar maupun dalam panggung politik nasional. Sebagai organisasi sayap perempuan resmi partai, KPPG dibentuk untuk menjadi sarana pembinaan dan pemberdayaan perempuan, serta memperkuat kapasitas politik kader-kader perempuan Golkar. Menurut Firdaus, Peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) merupakan hal penting dalam mendukung keterwakilan perempuan di tubuh Partai Golkar. KPPG didirikan berdasarkan keputusan RAPIMNAS Partai Golkar tahun 2002 sebagai respons terhadap kebutuhan akan organisasi sayap yang mewadahi perempuan untuk lebih aktif berpolitik, (FIRDAUS, n.d.). Tujuan utama KPPG adalah mendorong perempuan agar tidak hanya menjadi pelengkap kuota 30% dalam daftar caleg, tetapi mampu menempati posisi strategis di partai dan lembaga politik lainnya. Melalui berbagai pelatihan, sosialisasi, serta penguatan kapasitas kader perempuan, KPPG berupaya menciptakan perempuan yang tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga substansial dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam momentum pemilu juga, KPPG aktif merekrut dan menyiapkan kader perempuan untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik. Organisasi ini juga konsisten mengawal implementasi kuota 30 persen perempuan, agar tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar diisi oleh kandidat yang berkualitas dan berpeluang menang, (Lutfiyah, n.d.). Selain itu, KPPG membangun sinergi dengan berbagai organisasi perempuan dan lembaga negara seperti Komnas Perempuan maupun kementerian yang menangani isu perempuan, untuk memperkuat agenda kesetaraan gender. Dan di tingkat internal partai, KPPG juga menjalankan fungsi sebagai representasi suara perempuan yang aktif mengkritisi kebijakan partai yang belum responsif

terhadap isu gender, serta mendorong struktur partai yang lebih terbuka terhadap partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Asrida & Dewi, KPPG berperan bukan hanya sebagai organisasi sayap, tetapi sebagai mesin penggerak utama dalam menciptakan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi perempuan, (Asrida & Dewi, n.d.). KPPG mengembangkan agenda yang jelas dan sistematis, yang mencakup peningkatan jumlah dan kualitas kader perempuan, serta usaha menduduki posisi strategis dalam struktur partai. KPPG juga aktif dalam pendidikan politik melalui berbagai kegiatan seperti diklat kaderisasi, *training of trainer*, pelatihan juru kampanye, serta seminar politik yang menanamkan kesadaran politik dan membentuk kapasitas kepemimpinan perempuan. Selain itu, KPPG melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan partisipasi dalam komunitas keagamaan dan sosial untuk membaaur dengan masyarakat dan membangun citra positif. KPPG juga melakukan perannya dengan pembentukan strategi pembinaan kader perempuan, yang dimana KPPG menjalankan pelatihan dan pendidikan politik secara khusus untuk kader perempuan sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas dan pemberdayaan politik. Menurut AIRafni, strategi tersebut mencakup kebijakan “*one gate policy*”, di mana kader perempuan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya, baik dalam posisi legislatif maupun eksekutif, (AIRafni, 2013).

Dalam mendukung agenda politik gender, KPPG juga memperkuat jaringan kelembagaan dengan membentuk solidaritas kolektif, menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan organisasi perempuan lain, serta mendokumentasikan data gender melalui kerja sama dengan PUSDATIN PUANRI. Melalui KPPG, Golkar secara aktif mengembangkan pelatihan berjenjang mulai dari kader dasar hingga kader paripurna, termasuk program Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa) yang menasar tingkat akar rumput. KPPG juga menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal seperti Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), pemerintah daerah, dan LSM untuk mengadakan diklat dan pelatihan yang bersifat responsif gender, seperti legal drafting, public speaking, serta teknik kampanye dan komunikasi politik. Gerakan KPPG dalam Partai Golkar dinilai sistematis, berkelanjutan, dan berbasis pada strategi jangka panjang yang menekankan pentingnya kontinuitas, kolektivitas, solidaritas, serta profesionalisme kader. Dengan pendekatan tersebut, KPPG mampu menjadi penggerak utama dalam memperjuangkan representasi politik perempuan secara terstruktur dan tidak sekadar menjadi pelengkap administratif dari kuota 30 persen, tetapi benar-benar mendorong transformasi substantif dalam kepemimpinan politik perempuan di tubuh Partai Golkar, (Asrida & Dewi, n.d.).

Dalam konteks ini, KPPG tidak hanya bertugas meningkatkan kuantitas keterwakilan perempuan, tetapi juga memastikan kualitas dan kesiapan kader perempuan untuk mengambil peran strategis dalam pengambilan keputusan politik. KPPG menjadi motor penggerak dalam proses kaderisasi yang modern, terukur, dan terbuka dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan gender secara substansial di tubuh Partai Golkar. Seperti dalam teori gender dan politik Phillips, peran KPPG menunjukkan penerapan konsep *The Politics of Presence*, yakni keharusan menghadirkan perempuan secara nyata dalam lembaga politik agar pengalaman, kebutuhan, dan perspektif mereka turut mempengaruhi kebijakan publik, (Wibisono, 2022). Yang dimana Phillips menekankan bahwa sistem politik yang demokratis harus menciptakan ruang nyata bagi kelompok yang termarginalisasi, dan kehadiran fisik perempuan dalam politik merupakan prasyarat bagi lahirnya representasi yang adil. Dan KPPG melibatkan pelatihan berjenjang, program kaderisasi akar rumput, dan kerja sama lintas lembaga memperlihatkan langkah nyata dalam menciptakan kehadiran aktif dan berdaya perempuan dalam politik. Dengan demikian, dari perspektif Phillips, KPPG dapat dikatakan telah menjalankan peran representasi yang signifikan, karena menggabungkan keberadaan fisik perempuan di arena politik dengan upaya substantif untuk membela dan mengartikulasikan kepentingan mereka secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan.

Strategi yang Digunakan KPPG Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan

Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) merupakan salah satu organisasi sayap yang sangat strategis dalam mendorong peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di tubuh Partai Golkar.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

60

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



Sejak diresmikan sebagai organisasi sayap resmi partai pada tahun 2009, KPPG telah menjalankan berbagai strategi komprehensif yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam struktur kepemimpinan partai, tetapi juga memperkuat kualitas kepemimpinan perempuan di berbagai tingkatan. Salah satu strategi mendasarnya adalah melakukan rekrutmen dan kaderisasi secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Melalui program seperti “Desa Dasa Karya”, KPPG berupaya membangun jaringan kader perempuan yang solid di akar rumput, memastikan bahwa suara dan aspirasi perempuan tersalurkan secara efektif ke dalam kebijakan partai, (Jovani, 2024). Program ini juga menjadi sarana identifikasi potensi kader perempuan yang dapat diangkat ke posisi strategis di partai maupun di lembaga legislatif.

Selain itu, KPPG secara aktif melaksanakan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan bagi para kader perempuan. Setiap tahun, KPPG mengadakan Sekolah Politik Perempuan, pelatihan advokasi, serta workshop komunikasi politik yang bertujuan meningkatkan kapasitas, wawasan, dan kepercayaan diri kader perempuan untuk tampil sebagai pemimpin, (Naibaho, 2024). Data internal KPPG menunjukkan bahwa peserta pelatihan yang konsisten mengikuti program ini memiliki peluang 40% lebih besar untuk menduduki jabatan struktural di partai dibandingkan kader yang tidak mengikuti pelatihan. KPPG juga menyediakan *mentoring* dan *coaching* secara personal bagi calon legislatif perempuan, finansial, dan jejaring kampanye bagi para kader perempuan yang maju dalam kontestasi pemilu, (AIRafni, 2013). Dengan demikian, hambatan klasik seperti keterbatasan sumber daya dan akses jaringan politik dapat diminimalisir.

Strategi lain yang sangat penting adalah advokasi internal untuk memastikan implementasi kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan struktur kepengurusan partai. KPPG secara konsisten melakukan lobi dan negosiasi dengan DPP Partai Golkar agar kuota ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar diisi oleh kader perempuan yang kompeten dan berintegritas, (Saputri, 2024). KPPG juga mengawal proses penentuan nomor urut calon legislatif perempuan agar mereka mendapatkan posisi yang strategis dan memiliki peluang nyata untuk terpilih. Selain itu, KPPG aktif membangun aliansi lintas organisasi perempuan politik, seperti melalui Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), untuk memperkuat posisi tawar perempuan di ranah politik nasional, (Lutfiyah, n.d.). Kegiatan seperti peluncuran buku “Srikandi Partai Golkar” dan seminar nasional tentang kepemimpinan perempuan juga menjadi bagian dari strategi membangun narasi positif dan memperkuat citra perempuan Golkar sebagai pemimpin yang visioner dan berdaya saing.

Secara empiris, strategi-strategi yang dijalankan KPPG menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Jumlah anggota legislatif perempuan dari Partai Golkar di DPR RI meningkat dari 17.33% pada Pemilu 2014 menjadi 20.5% pada Pemilu 2019, dan seluruh anggota legislatif perempuan tersebut merupakan kader aktif KPPG, (Adrianty, n.d.). Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hal serupa juga terlihat dengan meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis, baik sebagai ketua fraksi, ketua komisi, maupun pimpinan DPRD. Namun, KPPG tetap menghadapi tantangan struktural seperti dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, pola rekrutmen yang masih didominasi oleh patronase, serta keterbatasan akses pada sumber daya politik dan finansial, (Masyuri & Febriyanti, 2025). Untuk mengatasi hal ini, KPPG terus memperkuat konsolidasi internal, serta mendorong partisipasi aktif perempuan muda melalui program kaderisasi berkelanjutan. Dengan strategi yang semakin terstruktur dan berbasis data, KPPG optimis dapat memperluas peran dan pengaruh perempuan dalam kepemimpinan Partai Golkar, sekaligus berkontribusi pada penguatan demokrasi dan pembangunan politik yang lebih inklusif di Indonesia. Sesuai dengan teori representasi politik Pitkin, terutama jenis representasi substantif, KPPG tidak hanya mendorong kehadiran perempuan secara fisik dalam struktur partai atau lembaga legislatif (representasi deskriptif), tetapi juga secara aktif mengupayakan agar kader perempuan benar-benar mewakili dan memperjuangkan kepentingan perempuan melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, mentoring, dan advokasi internal, (PERJUANGAN & PURNAMA, n.d.). Tindakan KPPG dalam memastikan bahwa perempuan tidak sekadar dijadikan pelengkap kuota 30%, melainkan diberikan

posisi strategis dan peluang nyata untuk menang, merupakan manifestasi nyata dari representasi substantif, di mana wakil benar-benar menjalankan tanggung jawab dan akuntabilitas politik terhadap kelompok yang diwakilinya.

Tantangan KPPG dalam Memperkuat Keterwakilan Perempuan di Partai Golkar

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan representatif. Di Indonesia, meskipun secara konstitusional perempuan memiliki hak yang setara dalam kehidupan politik, kenyataan di lapangan masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar, terutama dalam hal keterwakilan di lembaga legislatif dan posisi strategis di partai politik. Salah satu aktor penting dalam mendorong keterwakilan perempuan di tingkat partai adalah organisasi perempuan sayap partai, seperti Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), yang menjadi bagian integral dari Partai Golkar. KPPG didirikan dengan tujuan memperkuat partisipasi dan representasi politik perempuan, serta menjadi wadah kaderisasi perempuan dalam struktur partai. KPPG berperan sebagai jembatan antara kebijakan partai dengan aspirasi perempuan, serta menjadi agen strategis dalam rekrutmen dan pembinaan kader perempuan, (Mutmainnah, 2017). Namun, upaya yang dilakukan oleh KPPG untuk memperkuat keterwakilan perempuan di Partai Golkar tidak terlepas dari berbagai tantangan baik secara internal maupun eksternal. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi partai, tetapi juga berkaitan dengan budaya politik, akses terhadap sumber daya, dan persepsi masyarakat terhadap peran politik perempuan, (Sobari et al., 2020).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi KPPG adalah dalam proses rekrutmen dan kesiapan kader perempuan untuk maju sebagai calon legislatif. Meskipun Partai Golkar menunjukkan komitmen terhadap peningkatan jumlah caleg perempuan, tidak semua kader perempuan memiliki kesiapan politik maupun sumber daya untuk mencalonkan diri. Beberapa dari mereka mengalami hambatan dari aspek internal seperti kurangnya pengalaman, minimnya pelatihan kepemimpinan politik, hingga tekanan sosial dan keluarga yang masih memandang peran perempuan sebagai urusan domestik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah (2023), ditemukan bahwa meskipun KPPG telah melaksanakan berbagai program seperti sekolah politik perempuan, perekrutan caleg perempuan, dan bantuan finansial, masih banyak caleg perempuan yang mengundurkan diri setelah pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). Hal ini mencerminkan tantangan yang kompleks, tidak hanya dari sisi sistem partai, tetapi juga dari kesiapan individu dan keterbatasan lingkungan pendukung, (Lutfiyah, n.d.).

Selain itu, budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam struktur partai politik menjadi hambatan signifikan. Meskipun sudah ada regulasi afirmatif melalui kuota 30% keterwakilan perempuan, pelaksanaannya di banyak partai termasuk Golkar sering kali bersifat formalitas tanpa jaminan penempatan di nomor urut yang strategis atau daerah pemilihan potensial. Oktavira dan Magriasti (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen politik di Partai Golkar, jaringan patron-klien dan kedekatan dengan elite partai masih menjadi penentu utama, bukan kualitas dan kapasitas kader perempuan. Akibatnya, kader perempuan yang tidak memiliki akses ke jaringan kekuasaan partai seringkali terpinggirkan dalam proses pencalonan legislatif, (Oktavira & Magriasti, 2023b).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun non-finansial. Dalam sistem politik yang sangat kompetitif dan berbasis modal seperti Indonesia, kampanye membutuhkan dana yang besar serta jaringan yang luas. Perempuan, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang ekonomi kuat atau hubungan politik yang kuat, sering kesulitan memenuhi kebutuhan ini, (Hardjaloka, 2016). Walaupun KPPG telah mencoba menjembatani kendala ini dengan memberikan pelatihan dan bantuan terbatas, namun dukungan tersebut belum cukup untuk mengatasi kendala struktural yang lebih besar. Azkia (2020) menegaskan bahwa organisasi sayap perempuan seperti KPPG masih lebih banyak berperan dalam representasi deskriptif memenuhi angka kuota semata daripada representasi substantif yang benar-benar memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam kebijakan publik dan legislasi, (Azkia, 2020).

KPPG juga dihadapkan pada tantangan penguatan kelembagaan internal, yakni sejauh mana organisasi ini mampu mempengaruhi kebijakan partai induk. Banyak kebijakan partai yang masih ditentukan oleh elite laki-laki tanpa melibatkan suara organisasi perempuan. Dalam konteks ini, penguatan posisi tawar KPPG di internal partai sangat penting agar mampu memengaruhi keputusan-keputusan strategis, termasuk dalam penempatan caleg perempuan di posisi yang potensial dan dalam proses rekrutmen elite partai. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, KPPG telah mengembangkan strategi-strategi penguatan kapasitas politik perempuan. Upaya tersebut meliputi pelatihan kepemimpinan politik, pembekalan komunikasi politik, pendampingan bagi caleg perempuan, hingga advokasi kebijakan afirmatif di internal partai.

Selain itu, KPPG juga mendorong agar perempuan tidak hanya menjadi objek rekrutmen politik, tetapi menjadi subjek aktif dalam pengambilan kebijakan strategis partai. Namun, untuk menjadikan strategi ini efektif, KPPG memerlukan dukungan kelembagaan dan perubahan budaya politik yang lebih luas, termasuk perubahan persepsi masyarakat terhadap peran perempuan di ruang publik. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi KPPG dalam memperkuat keterwakilan perempuan di Partai Golkar menunjukkan bahwa perjuangan politik perempuan tidak bisa dilepaskan dari konteks struktur partai, budaya patriarki, dan sistem politik yang masih sangat maskulin. Upaya organisasi perempuan seperti KPPG perlu mendapat dukungan nyata, tidak hanya dari internal partai tetapi juga dari masyarakat sipil, media, dan institusi negara. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik bukan sekadar soal jumlah, tetapi menyangkut bagaimana perempuan dapat secara aktif dan efektif terlibat dalam pengambilan keputusan dan membawa perubahan bagi kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) memiliki peran strategis dalam memperjuangkan dan meningkatkan keterwakilan serta partisipasi politik perempuan di struktur kepemimpinan Partai Golkar melalui berbagai strategi seperti kaderisasi berjenjang, pendidikan politik, advokasi kuota 30%, serta pembangunan jaringan lintas lembaga. KPPG tidak hanya mendorong keterwakilan deskriptif, tetapi juga substantif, yaitu memastikan perempuan tidak sekadar hadir sebagai pelengkap, melainkan memiliki kapasitas, posisi strategis, dan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan politik. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi tantangan besar seperti budaya patriarki, dominasi elite laki-laki, keterbatasan sumber daya, serta resistensi internal terhadap perubahan. Dengan pendekatan sistematis dan dukungan konsep representasi politik dari Hanna Pitkin serta politik kehadiran dari Anne Phillips, KPPG menunjukkan komitmen untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan perempuan, meskipun perubahan struktural dan kultural di tubuh partai masih sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas perjuangan tersebut.

REFERENSI

- Adrianty, A. A. (n.d.). *Perempuan Dan Parlemen Studi tentang Meningkatnya Perolehan Kursi DPR RI Perempuan Partai Golkar pada Pemilu 2019*. (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- AlRafni, A. (2013). KESETARAAN GENDER DALAM POLITIK. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 3(2), 145–171.
- Annur, M. F., & Hermansyah, H. (2020). Analisis kesulitan mahasiswa pendidikan matematika dalam pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19. *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 11(2), 195–201.
- Asrida, W., Wazni, & Dewi, C. P. (2009). Gerakan politik perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru periode 2004–2009 dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(17).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

63

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



- Ayunda, L., & Mahardika, A. (2022). Strategi manajemen organisasi dalam upaya meningkatkan keaktifan kader perempuan di DPD Golkar Tebing Tinggi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 2(1).
- Azkiya, D. A. N. (2020). Penguatan Kapasitas Politik Representasi Perempuan Melalui Organisasi Perempuan Sayap Partai Politik: Kajian atas PUAN (PAN), Garnita Malahayati (NasDem), dan KPPG (Golkar). *Universitas Gadjah Mada*.
- Farhah, I. A. (2018). *Partai politik dan keterwakilan perempuan: Analisis problematika partai politik dalam memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak periode 2014-2019*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., & Sipayung, J. B. (2024). Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Partai Politik Dan Konsekuensi Dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 Dan 2024. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 84–101.
- FIRDAUS, A. C. (n.d.). *PARTISIPASI PEREMPUAN PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH*. (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fitriana, N. N. (2019). Menakar Representasi Dalam Konflik di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta. *International Journal of Demos*, 1(3), 366–381.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100.
- Hardjaloka, L. (2016). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 403–430.
- Jovani, A. (2024). *Perempuan di Parlemen Lokal: Pengalaman dari Nusa Tenggara Timur*.
- Lestari, N. I. (2019). *Partai Politik Dan Perempuan (Studi atas Kegagalan Partai Gerindra Menghadirkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tangerang pada Pemilu 2019)*. (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lutfiyah, J. (n.d.). *Perempuan Dan Politik Upaya Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Dalam Peningkatkan Keterpilihan Perempuan Partai Golkar Di DPR RI Pada Pemilu Legislatif 2019*. (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Masyuri, R. A., & Febriyanti, D. (2025). Strategi Kemenangan Partai Golkar dalam Meningkatkan Representasi Perempuan pada Pemilihan DPRD Tingkat 1 Kota Palembang. *The Journalish: Social and Government*, 6(1), 99–110.
- Mutmainnah, M. (2017). Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Partai Golkar pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sidrap. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 3(2), 94–107.
- Muzaeni, A. (n.d.). *POLITIK PEREMPUAN DI TINGKAT LOKAL*.
- Naibaho, Y. M. (2024). *Strategi Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sumatera Utara Mengantarkan Kader-Kader Perempuan Partai Golkar Menuju Pemilihan Umum 2024*. (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Oktavira, S., & Magriasti, L. (2023). The role of Golkar Party Women Units (KPPG) in the political recruitment of women legislative candidates. *SOSIOEDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 12(1), 1–8.
- Legislative Candidates. *SOSIOEDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 12(1).
- PERJUANGAN, K. M. P. P. P., & PURNAMA, S. V. (n.d.). *STRATEGI PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN (STUDI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMILU 2014)*.
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Clarendon Press.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

- Randi, S. (2024). *Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pileg Dprk Kota Banda Aceh Tahun 2024*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-raniry).
- Safithri, R. (2024). *Relasi Gender di Parlemen*. Deepublish.
- Saputri, T. (2024). Glass Ceiling: Perempuan dan Puncak Kekuasaan pada DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 157–170.
- Sobari, I., Nasution, R. D., & Khoirrurosyidin. (2020). Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Ponorogo. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(2).
- Suryani, S., & Azmy, A. S. (2020). Partisipasi politik buruh perempuan: analisis terhadap keterlibatan buruh perempuan dalam serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan-serikat pekerja seluruh Indonesia/SP KEP-SPSI. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15(1), 19–40.
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169–189.
- Wibisono, R. B. (2022). Pencapaian identitas politik perempuan di Indonesia. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1), 67–80.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

65

